

Praktik Diskriminasi Rasial Mahasiswa Papua dalam Perspektif Budaya

Oleh:

Tania Puti Khansa¹, Linda Zakiah², Desti Dewi Sintya³, Fitria Tiara Angel⁴, Pramudita Rita Anjarwati⁵, Sukma Kholisah⁶
Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3,4,5,6}

E-mail : taniaputikhansa@gmail.com, lindazakiah@unj.ac.id, destidewi2003@gmail.com, fitriatiaraangel2004@gmail.com, pramurita@gmail.com, sukmakholisahh114@gmail.com

Proses Review 12 April – 26 Mei 2025, dinyatakan lolos 27 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of racial discrimination experienced by Papuan students from a cultural perspective. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) of five relevant journal articles. The results reveal that discrimination against Papuan students arises from a lack of cultural understanding, negative stereotypes, and social inequality. Identified forms of discrimination include housing rejection, verbal abuse, social exclusion, and discriminatory treatment by security forces. The impacts are highly significant on the psychological well-being, academic achievement, and social integration of Papuan students. Proposed solutions include strengthening multicultural education, implementing cross-cultural counseling, providing legal protection, and reinforcing local regulations. These findings highlight the importance of applying intercultural approaches and upholding social justice principles to create an inclusive and harmonious social environment.

Keywords: *Racial discrimination, Papuan students, Cultural perspective, Multicultural education.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa Papua dari perspektif budaya. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap lima artikel penelitian yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa diskriminasi terhadap mahasiswa Papua muncul akibat kurangnya pemahaman budaya, stereotip negatif, dan ketidaksetaraan sosial. Bentuk diskriminasi yang diidentifikasi mencakup penolakan tempat tinggal, kekerasan verbal, pengucilan sosial, hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat keamanan. Dampaknya sangat signifikan terhadap kesejahteraan psikologis, akademik, serta integrasi sosial mahasiswa Papua. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan pendidikan multikultural, konseling lintas budaya, perlindungan hukum, dan penguatan regulasi daerah. Temuan ini menekankan

pentingnya penerapan pendekatan interkultural dan penegakan prinsip keadilan sosial untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis.

Kata kunci: *Diskriminasi rasial, Mahasiswa Papua, Perspektif budaya, Pendidikan multikultural.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara multikultural yang kaya akan keanekaragaman budaya, ras, etnis, agama, suku bangsa, dan bahasa (Zakiah, Tri, et al., 2024). Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”, yang secara tidak langsung mengandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Berbagai bentuk keberagaman ini menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk (Gofur et al., 2022). Namun, dalam upaya menciptakan persatuan, keberagaman ini kerap menjadi tantangan tersendiri karena adanya perbedaan pandangan berdasarkan budaya, ras, etnis, agama, suku bangsa, dan bahasa (Zakiah, Zamroni, et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dan saling menghargai antar kelompok, melalui pendidikan multikultural. Pendidikan ini membekali pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat majemuk, guna mencegah konflik keberagaman (Zakiah, Zakya, et al., 2024).

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak seluruh warga negaranya. Namun, perilaku diskriminasi pada suatu ras, gender, dan agama masih sering membatasi hak-hak asasi individu di lingkungan sosial (Imfakwak, 2023). Sehingga, diskriminasi masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik. Berbagai tindak diskriminasi masih terjadi, terutama dalam bentuk diskriminasi rasial (Simbolon et al., 2023). Diskriminasi rasial di

Indonesia merupakan salah satu isu yang terus menjadi perhatian, terutama dalam konteks masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara, praktik diskriminasi masih terjadi di berbagai sektor kehidupan. Salah satu kelompok yang sering mengalami diskriminasi adalah mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah asal mereka (Ghozali, Liana, Afra, & Siregar, 2024). Mereka kerap menghadapi perlakuan tidak adil, stereotip negatif, dan marginalisasi sosial yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan akademik mereka (Husna & Aryani, 2023).

Fenomena diskriminasi terhadap mahasiswa Papua tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan sosial semata, tetapi juga sebagai benturan budaya. Perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai antara mahasiswa Papua dan masyarakat di daerah tempat mereka belajar seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan prasangka. Salah satu praktik diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019, mereka dituduh menodai bendera Indonesia. Sehingga, mereka mendapat perlakuan keras dari aparat keamanan dan komentar rasis dari berbagai pihak (Ghozali, Liana, Afra, & Siregar, 2024). Selain itu, praktik diskriminasi terhadap mahasiswa Papua juga terjadi di Yogyakarta, yang mencakup penolakan dalam memperoleh tempat tinggal dan perlakuan tidak adil dalam lingkungan akademik (Imfakwak, 2023). Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa peraturan

yang ada masih lemah dan kurangnya perlindungan yang memadai bagi kelompok ras minoritas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika diskriminasi terhadap mahasiswa Papua, mengidentifikasi penyebabnya, menganalisis dampaknya terhadap integrasi sosial, merumuskan solusi, dan mengkaji isu ini dalam perspektif budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika diskriminasi terhadap mahasiswa Papua dalam perspektif budaya dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam menelusuri, mengevaluasi, dan mensintesis artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian sebelumnya untuk menggambarkan praktik diskriminasi rasial mahasiswa Papua dalam perspektif budaya, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari berbagai penelitian yang diambil sebagai sumber referensi. Subjek dari penelitian ini adalah artikel jurnal yang sudah terpublikasi.

Peneliti mengumpulkan artikel-artikel dari basis data Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish. Kata kunci yang digunakan adalah “Diskriminasi Rasial Mahasiswa Papua”. Berdasarkan hasil pencarian, ditemukan 5 artikel yang relevan dengan topik penelitian.

III. PEMBAHASAN

Pada tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa Papua sering mengalami berbagai diskriminasi, baik dalam interaksi antar individu maupun dalam sistem kelembagaan (Ghozali et al., 2024). Dalam perspektif

budaya, diskriminasi terjadi karena tidak memahami dan menghargai budaya kelompok lain (Zakiah et al., 2023). Ketika budaya Papua tidak dipahami secara utuh, stereotip negatif dengan mudah berkembang dan menciptakan jarak sosial (Purnamasari et al., 2023). Permasalahan tersebut merupakan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang berawal dari sikap anti minoritas dan intoleran kelompok lain terhadap kelompok tertentu (Safitri et al., 2024). Diskriminasi merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia (Ananta et al., 2024). Berikut temuan yang didapat dari hasil studi literatur terhadap 5 artikel:

Berdasarkan artikel berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya” dengan penulis Ghozali, dkk (2024) mengemukakan bahwa diskriminasi yang menimpa 43 mahasiswa asal Papua di salah satu asrama di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 disebabkan oleh beredarnya sebuah foto di aplikasi daring yang dicurigai mahasiswa tersebut yang melakukan penurunan bendera Merah Putih dan membuangnya ke dalam selokan. Selain itu, beberapa kelompok memanfaatkan isu kemerdekaan Papua untuk memecah belah masyarakat. Akibatnya, oknum ormas dan aparat keamanan melakukan penyerangan, diskriminasi, dan penangkapan secara paksa. Dampak dari konflik tersebut yaitu mahasiswa Papua mengalami luka-luka akibat penyerangan dan gas air mata. Selain itu, adanya sarkasme dari masyarakat kepada mahasiswa asal Papua yang menambah perpecahan dan memperlebar kesenjangan di Indonesia. Mahasiswa Papua juga menjadi mengurung diri karena merasa terkucilkan. Dampak lainnya juga terlihat dari masyarakat Manokwari dan Sorong yang protes dan menempuh jalur hukum atas penganiayaan

dan diskriminasi yang menimpa mahasiswa papua. Solusi dari konflik diskriminasi tersebut adalah adanya perlindungan hukum terhadap mahasiswa Papua yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kebebasan bersuara tanpa adanya diskriminasi (Ghozalli et al., 2024).

Pada artikel yang berjudul “Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua di Tengah Multikulturalisme” dengan penulis Purnamasari dkk (2023) mengemukakan bahwa konflik dimulai pada tanggal 15 Juli 2016, terjadi pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta, bertepatan dengan pentas seni dalam rangka memperingati hari wafatnya seniman asal Papua yaitu Arnold C. A. Pada tanggal 2 dan 31 Mei 2016 terjadi pengepungan kembali pada acara Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Pengepungan terus berlanjut pada tanggal 14 Juni dalam memperingati hari wafatnya Musa Mako Tabuni yang ditembak oleh aparat dan tanggal 1 Juli dalam memperingati hari Proklamasi. Pada tanggal 15 Juni 2016, terjadi penganiayaan, rasisme, dan pengurungan di dalam asrama terhadap mahasiswa yang mendukung ULMWP. Faktor penyebab dari konflik tersebut adalah adanya kemarahan aparat pemerintah karena mahasiswa Papua menyuarkan hak kebebasan bersuara. Gubernur Hamengku Buwono menganggap mahasiswa Papua sebagai kelompok separatisme yang seharusnya meninggalkan Yogyakarta. Dampak dari konflik diskriminasi tersebut adalah menghambat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah, adanya ketegangan masyarakat akibat kehadiran aparat keamanan yang bersenjata, sulitnya mahasiswa Papua dalam mencari indekos karena mengalami berbagai bentuk penolakan, meningkatkan konflik dalam skala luas, dan menurunnya martabat polisi

yang seharusnya melindungi masyarakat justru sebagai pelaku diskriminasi serta melanggar HAM. Solusi dari konflik diskriminasi terhadap mahasiswa Papua yaitu adanya pendekatan budaya, komunikasi antara aparat dan mahasiswa Papua, serta sikap toleransi dari masyarakat untuk menghilangkan stereotip negatif terhadap mahasiswa Papua (Purnamasari et al., 2023).

Artikel selanjutnya yang berjudul “Optimasi Peran Pemerintah Daerah: Solusi Discriminatory Housing Practice Terhadap Mahasiswa Pendatang Papua di Kabupaten Sleman” dengan penulis Pricillia Putri dkk (2020) mengemukakan bahwa faktor stereotip dan respon masyarakat Kabupaten Sleman kepada mahasiswa pendatang dari Papua yang mengarah kepada perilaku diskriminasi aktif yang berpotensi menjurus pada konfrontasi dan konflik terbuka, ini dapat merugikan bagi pendatang yang secara umum ingin menuntut ilmu/mencari nafkah. Dengan adanya stereotip ini masyarakat Papua yang merantau ke daerah Kabupaten Sleman merasa kesulitan mencari tempat tinggal seperti contohnya Yehuda Nowa seorang mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada yang berasal dari Sorong, Papua Barat selalu mendapat penolakan dari 5-6 pemilik kos dengan alasan kamar kos-kosan mereka baru saja penuh setelah melihat dan menanyakan dari mana Yehuda berasal.

Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa ada juga seorang mahasiswa bernama Roman, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada yang mudah mendapatkan kos-kosan setelah menyebutkan latar belakang tujuan ia ingin tinggal di kosan itu untuk menempuh pendidikan di suatu instansi yang cukup terkenal di daerah tersebut. Berdasarkan pernyataan Roman faktor penerimaan kos-kosan yang sulit di latar belakang adanya stereotip bahwa mahasiswa pendatang Papua

sering mengacau, mabuk, berkelahi dan melakukan hal-hal negatif lainnya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengevaluasi dan merekonstruksi Perda Pemonudukan, Penguatan Peran Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Sosialisasi dan Pendampingan, serta Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Masyarakat Suku Jawa kerap menilai masyarakat Suku Papua sebagai suku yang berperilaku terus terang, keras dan biadab, ini sangat bertentangan dengan pandangan Suku Jawa yang sulit dalam berterus terang, lembut bertata bahasa serta lebih sopan. Melihat kondisi tersebut, kebutuhan akan tempat tinggal mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemonudukan (Perda Pemonudukan) dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemonudukan (Perbup Penyelenggaraan Pemonudukan) sebagai instrumen pelaksanaannya agar tidak ada diskriminasi terhadap para pendatang dari Papua di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan artikel yang berjudul “Konseling Lintas Budaya dan Agama: Suatu Upaya Penanganan Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua” dengan penulis Fitria Husna dan Sekar Ayu Aryani (2023) mengemukakan konflik diskriminasi yang biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas dan dominan kepada kelompok minoritas atau lemah. Banyak penelitian yang menunjukkan bentuk diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua saat merantau di berbagai daerah untuk menempuh jalur pendidikan selalu mendapat penghinaan, labelling, penindasan, intimidasi ujaran kebencian dan wujud kekerasan lainnya. Sebagai contoh pada penelitian Ridwan (dalam Fitria et al., 2023) yang dilakukan oleh Dea di Aceh, kebanyakan mahasiswa Papua mendapat label “orang asing” oleh

rekan sesama mahasiswa yang berasal dari Aceh, tindakan tersebut membuat mahasiswa Papua merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan rekan sesama mahasiswa. Semua perbuatan diskriminasi ini dilatarbelakangi atas dasar ketidakpahaman, ketidakpedulian dan ketakutan pada individu atau kelompok tertentu yang terlihat berbeda dengan masyarakat lokal pada umumnya. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan konseling lintas budaya dan agama kepada masyarakat yang dimulai dari lingkup pendidikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh lingkup terdekat dan masyarakat sekitar. Melalui konseling lintas budaya dan agama dapat diterapkan layanan baik sebagai upaya preventif (pencegahan), hingga kuratif (penyembuhan) dan developmental (pengembangan). Dengan adanya pendekatan konseling lintas budaya dan agama, maka diharapkan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan masyarakat mayoritas kepada mahasiswa Papua yang sedang merantau sehingga terciptanya kehidupan yang saling menghargai suku, ras, bangsa dan agama serta dapat hidup damai secara berdampingan.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam artikel “Perlakuan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua di Kota Studi Yogyakarta” oleh Imfakwak Kapisa, dalam konteks diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta, perbedaan budaya menjadi salah satu faktor utama. Mahasiswa Papua memiliki cara komunikasi yang berbeda, baik dari segi bahasa, bahasa tubuh, maupun ekspresi emosional, yang sering dianggap asing dan tidak dipahami oleh masyarakat lokal. Selain itu, ekspresi identitas seperti pakaian adat, tradisi, serta kebiasaan hidup mereka seringkali tidak dihargai atau bahkan diabaikan, sehingga menimbulkan stereotip negatif. Nilai-nilai hidup yang berakar pada budaya Papua juga tidak terekspos secara luas, menyebabkan kurangnya pemahaman dan penerimaan dari

masyarakat mayoritas yang berbeda budaya. Artikel menunjukkan bahwa budaya Jawa dan budaya mayoritas lainnya di Yogyakarta cenderung mendominasi ruang publik, baik dari segi kebiasaan adat maupun gaya hidup, sehingga ekspresi budaya Papua sering terpinggirkan. Dominasi ini menimbulkan suasana di mana budaya Papua tidak dihargai dan diabaikan, yang kemudian memperkuat diskriminasi dan stereotip negatif terhadap mereka. Kurangnya ruang dan penghargaan terhadap keberagaman budaya memperkuat ketegangan antar budaya dan memperpanjang konflik sosial.

Konflik terjadi karena benturan budaya antara masyarakat mayoritas dan mahasiswa Papua, yang dipicu oleh kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan terhadap keberagaman budaya. Perbedaan komunikasi dan ekspresi identitas menjadi faktor yang memicu stereotip dan prasangka negatif. Selain itu, munculnya diskriminasi ini menyebabkan mahasiswa Papua merasa teralienasi, kehilangan identitas, dan mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan tidak adil di ruang publik dan pendidikan. Solusi yang diusulkan melibatkan penerapan pendidikan multikultural dan interkulturalisme sebagai upaya memperbaiki komunikasi lintas budaya. Dengan pemahaman dan pengetahuan tentang keberagaman, masyarakat diharapkan dapat menghargai dan menerima identitas budaya lain, termasuk budaya Papua. Pendidikan ini harus dimulai dari tingkat dasar hingga ke pendidikan tinggi, agar budaya kerukunan dan saling pengertian dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, penting adanya ruang publik yang inklusif dan program sosial yang mampu mempererat interaksi antar budaya, agar diskriminasi dapat dikurangi dan harmoni sosial terbentuk.

Dalam kerangka budaya, diskriminasi dianggap sebagai manifestasi dari benturan

budaya dan minimnya pemahaman interkultural. Ketika budaya mayoritas tidak cukup mampu memahami dan menghargai budaya minoritas, konflik dan stereotip akan muncul. Kurangnya dialog terbuka, serta tidak adanya ruang untuk mengekspresikan keberagaman budaya secara adil, memperpanjang ketegangan sosial.

Pendidikan multikultural dan interkulturalisme menjadi kunci utama dalam mengatasi diskriminasi budaya. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai saling menghormati dan memahami keberagaman, masyarakat akan mampu mengembangkan solidaritas dan harmonisasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi prasangka tetapi juga membangun identitas bersama bangsa yang beraneka ragam, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai artikel dan data yang tersedia, diketahui bahwa mahasiswa Papua sering mengalami diskriminasi rasial dan budaya di luar daerah asal mereka, seperti di Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya. Diskriminasi ini muncul akibat adanya ketidaktahuan, stereotip, dan prasangka negatif terhadap budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat asli Papua. Perbedaan komunikasi dan ekspresi identitas, seperti pakaian adat dan tradisi, sering dianggap asing atau tidak dihargai, sehingga menimbulkan perlakuan tidak adil dan marginalisasi sosial. Praktik diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis mahasiswa Papua, yang merasa teralienasi dan kehilangan identitas, tetapi juga menimbulkan konflik sosial, ketegangan, bahkan kekerasan di masyarakat.

Selain itu, faktor utama penyebab diskriminasi berasal dari ketidakpahaman dan ketakutan terhadap keberagaman budaya, serta stereotip yang berkembang dari sikap intoleransi dan kelompok mayoritas yang

dominan. Konsekuensinya, mahasiswa Papua menghadapi perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari seperti sulit mendapatkan tempat tinggal (kos), mengalami penghinaan, penolakan, bahkan perlakuan kasar dari aparat dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, solusi yang diusulkan meliputi penerapan pendidikan multikultural dan interkulturalisme yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, penghargaan, dan saling pengertian terhadap keberagaman budaya. Pendidikan ini dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi agar warga mampu memahami dan menghargai keberagaman sejak dini. Selain itu, pendekatan lintas budaya dan agama melalui konseling dan sosialisasi di lingkungan pendidikan dan masyarakat juga penting dilakukan sebagai langkah preventif dan kuratif, guna menurunkan tingkat stereotip dan prasangka. Pemerintah dan masyarakat juga disarankan memperkuat peraturan dan sosialisasi mengenai hak asasi manusia, termasuk penguatan regulasi terkait ruang hidup dan tempat tinggal mahasiswa Papua agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif.

Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif, diperlukan sikap toleransi, saling menghormati, serta penegakan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Melalui pendidikan yang inklusif dan pendekatan budaya yang sensitif, diharapkan stereotip dan prasangka dapat diminimalisir, sehingga mahasiswa Papua dapat menuntut pendidikan dan menjalani kehidupan sosial tanpa rasa takut dan terasing, serta memperkuat semangat Bhineka Tunggal Ika dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta, Z. D., Astuti, A. P., Rahayu, P. A., Ibrahim, M. J., & Anshori, M. I. (2024). Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan

Etika. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 106–120. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638>

Ghozali, M., Liana, N., Afra, C., & Siregar, Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(3), 727–736.

Ghozali, M., Liana, N., Afra, C., Siregar, Z., & Nurfahni. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua di Surabaya. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13132543>

Gofur, Auliya, M., & Nursikin, M. (2022). Konsep Dasar Pendidikan Multikultural. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(4), 143–149.

Husna, F., & Aryani, S. A. (2023). Konseling Lintas Budaya Dan Agama: Suatu Upaya Penanganan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 9(2), 386. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v9i2.10469>

Imfakwak, K. (2023). Perlakuan Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Papua Di Kota Studi Yogyakarta. *Commsphere: Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 1(II), 48–56. <https://doi.org/10.37631/commsphere.v1iii.1014>

Purnamasari, A. S., Nurhalqim, S. A., & Dermawan, W. (2023). Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua di Tengah Multikulturalisme. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*.

- Safitri, S. N., Zakiah, L., Wahyuningsih, S., Hayati, S. D., & Maulidina, C. A. (2024). Analisis Peran Pendidikan Multikultural dalam Upaya Meningkatkan Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Inklusi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.
- Simbolon, A. A. P., Simanjorang, J. Y., & Wicaksono, K. W. (2023). Studi Fenomenologi Tindakan Rasialisme Terhadap Mahasiswa Papua di Kota Yogyakarta. *Contemporary Public Administration Review*, 1(1), 59–73. <https://doi.org/10.26593/copar.v1i1.7121.59-73>
- Zakiah, L., Sarkadi, Marini, A., Komarudin, Rudi Casmana, A., & Pitaloka Kusmawati, A. (2023). Implementation of Teaching Multicultural Values Through Civic Education for Elementary School Students. In *www.jsser.org Journal of Social Studies Education Research Sosial Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi* (Vol. 2023, Issue 1). www.jsser.org
- Zakiah, L., Tri, P., Maulida, N., Ananda, S., & Jaya Indra. (2024). Pentingnya Pendidikan Multikultural Dan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Dalam Menghargai Keberagaman: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 15(1).
- Zakiah, L., Zakya, A. L. F., Nabilah, R., Aisyah, S. N., & Maulidina, C. A. (2024). Meningkatkan Kualitas Karakter Siswa Melalui Keberagaman pada Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1023–1028. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2257>
- Zakiah, L., Zamroni, A. D. K., Amelia, C. R., Shaliha, H. A., & Jaya, I. (2024). Analisis Pengaruh Implementasi Pendidikan Multikultural Terhadap Sikap Toleransi Keberagaman Siswa Sekolah Dasar Inklusi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9, 1112–1119.